KABUPATEN SUMENEP

PENYUSUNAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI

KABUPATEN SUMENEP

TAHUN 2020

Dinas Komunikasi dan Informatika

SAMBUTAN BUPATI KABUPATEN SUMENEP

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2020 bisa diselesaikan tepat waktu.

Sebagai dasar penentu strategi dan kebijakan dalam perencanaan pembangunan ekonomi, maka diperlukan berbagai macam data statistik agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Buku Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2020 merupakan sajian informasi yang dipersiapkan khusus dalam menunjang ketersediaan data yang akan digunakan sebagai dasar penentu kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumenep. Informasi yang disajikan terdiri atas gambaran kondisi perekonomian dan sosial di Kabupaten Sumenep.

Informasi yang tersaji dalam publikasi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyajian pada masa mendatang. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Akhirnya, kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep serta semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini saya ucapkan terima kasih.

BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan buku Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2020. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk menyediakan data dan analisis ekonomi secara makro dalam perencanaan pembangunan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi ekonomi 2015 – 2019 yang mencakup beberapa indikator.

Hasil analisis diharapkan dapat memberikan masukan penting bagi semua pihak sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan, perbaikan, dan penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Sumenep.

Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam buku Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sumenep, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan masukan untuk perbaikan buku ini.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMENEP

FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SAMBUTAN BUPATI KABUPATEN SUMENEP ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sasaran 3

1.5 Ruang Lingkup 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Sumenep 5

2.2 Konsep dan Definisi Indikator Ekonomi Makro 6

2.3 Pendapatan Domestik Regional Bruto 6

2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi 8

2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 9

2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 9

2.8 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 10

2.9 Kemiskinan 10

2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 12

2.11 Analisis Location Quotient (LQ) 13

2.12 Analisis Model Rasio Pertumbuhan 14

2.13 Shift Share 17

2.14 Analisis Tipologi Klassen 19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 22

3.1 Sumber Data 22

3.2 Langkah Penelitian 22

3.3 Teknik Analisis Data 23

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 25

4.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumenep 25

4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep 29

4.3 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten Sumenep 32

4.4 Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep 33

4.5 Kemiskinan Kabupaten Sumenep 35

4.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep 38

4.7 Analisis *Location Quotient* (LQ) 40

4.8 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 42

4.9 Analisis *Shift Share* (SS) 43

4.10 Analisis Tipologi Klassen 45

4.11 Analisis *Overlay* 47

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 49

5.1 Kesimpulan 49

5.2 Rekomendasi 51

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumenep 2015 - 2019 ... 25

Tabel 4.2 Hasil Analisis *Shift Share* Kabupaten Sumenep dengan Wilayah Referensi Provinsi Jawa Timur 44

Tabel 4.3 Hasil Tipologi Klassen Kabupaten Sumenep dengan Wilayah Referensi Provinsi Jawa Timur 45

Tabel 4.4 Hasil Analisis *Overlay* Kabupaten Sumenep dengan Wilayah Referensi Provinsi Jawa Timur 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Sumenep 27

Gambar 4.2 Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Sumenep 28

Gambar 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep 30

Gambar 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep Menurut Lapangan Usaha 31

Gambar 4.5 PDRB Per Kapita Kabupaten Sumenep 32

Gambar 4.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sumenep..... 34

Gambar 4.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumenep 35

Gambar 4.8 Garis Kemiskinan Kabupaten Sumenep 36

Gambar 4.9 Penduduk Miskin Kabupaten Sumenep..... 37

Gambar 4.10 P1 dan P2 Kabupaten Sumenep..... 38

Gambar 4.11 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep 39

Gambar 4.12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep 40

Gambar 4.13 Hasil Perhitungan Analisis LQ dengan Wilayah Referensi Provinsi Jawa Timur 41

Gambar 4.14 Hasil Perhitungan Analisis MRP Wilayah Referensi Provinsi Jawa Timur 42

Gambar 4.15 Hasil Perhitungan Tipologi Klassen Wilayah Referensi Provinsi Jawa Timur 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Namun sebagai upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial – ekonomi masyarakat luas, tujuan dasar pembangunan ekonomi tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), namun juga untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar masyarakat.

Masalah ketimpangan pendapatan telah lama menjadi persoalan pelik dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan berkembang. Seperti halnya dalam pembangunan ekonomi nasional, tujuan pembangunan daerah juga dimaksud untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah sebagai institusi pelaksana pembangunan di daerah juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang hingga saat ini berupaya untuk terus menerus melakukan program – program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan diukur dari pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat capaian indikator sasaran itulah

yang dapat dijadikan ukuran suatu keberhasilan atau kegagalan dari rangkaian proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan beberapa indikator makro ekonomi sebagai dasar untuk menentukan sejauh mana pembangunan ekonomi Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, perlu adanya Penyusunan Analisis Makro Ekonomi.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten/ Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi dimaksudkan untuk memberikan analisis indikator makro ekonomi Kabupaten Sumenep.

Tujuan dilaksanakan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang kondisi makro ekonomi Kabupaten Sumenep
2. Menyusun analisis Indikator Ekonomi Kabupaten Sumenep

1.4 Sasaran

Sasaran dalam Penyusunan Indikator Makro Ekonomi adalah tersusunnya Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Sumenep sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah indikator ekonomi makro Kabupaten Sumenep, beserta informasi dan analisisnya yang terkait dengan pembangunan ekonomi Kabupaten Sumenep dalam kurun 2015 – 2019. Indikator makro ekonomi tersebut antara lain adalah: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, PAD terhadap PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Sumenep

Wilayah Kabupaten Sumenep berada diujung timur Pulau Madura dimana terdapat 27 Kecamatan, 19 Kecamatan daratan dan 8 Kecamatan kepulauan. Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Pulau paling utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak ±151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau yang paling timur adalah Pulau Sakala dengan jarak ±165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget.

Posisi geografis Kabupaten Sumenep terletak diantara 113º 32’ - 116º 16’ Bujur Timur dan 4º 55’ - 7º 24’ Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan
- Sebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores

Secara administratif Kabupaten Sumenep termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 wilayah kecamatan, 334 desa/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 2,093.47 km2. Pusat pemerintahan Kabupaten Sumenep berada di Kota Sumenep tepatnya di Kecamatan Kota Sumenep. Penduduk di Kabupaten Sumenep pada tahun 2018 mencapai 1.085.227 jiwa, yang terdiri laki-laki sebanyak 516.332 jiwa dan

perempuan sebanyak 568.905 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 2.093,47 km^2 , setiap km2 ditempati penduduk sebanyak 518 orang pada tahun 2018 (BPS, 2019).

2.2 Konsep dan Definisi Indikator Ekonomi Makro

Indikator makro ekonomi adalah statistik yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi saat ini dan saat yang akan datang. Statistik tersebut diterbitkan secara periodik (umumnya harian, bulanan, maupun tahunan) oleh pemerintah, lembaga-lembaga, ataupun organisasi-organisasi swasta. Indikator makro ekonomi tersebut dipublikasikan berdasarkan atas pengamatan terhadap industri-industri, wilayah/daerah, ataupun negara.

Fungsi utama indikator makro ekonomi adalah untuk menganalisis perkembangan ekonomi saat ini dan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Fungsi lain dari indikator makro ekonomi adalah untuk mengatur atau mengubah ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, indikator makro ekonomi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar valuta asing, pasar saham, dan pasar bursa berjangka.

Secara lebih spesifik, terdapat indikator-indikator makro ekonomi yang perlu untuk diamati. Indikator-indikator dimaksud adalah PDRB, tingkat inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat kesempatan kerja, dan tingkat pengangguran (BPS, 2018).

2.3 Pendapatan Domestik Regional Bruto

Secara umum Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu

periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. PDRB disajikan atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku menceritakan nilai ekonomi yang tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan volume produksi tetapi juga dipengaruhi oleh inflasi harga.

Melalui distribusi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dapat diketahui struktur perekonomian suatu wilayah. Selain itu, kinerja perekenomian daerah yang dinilai dari pertumbuhan ekonominya dapat diketahui melalui nilai PDRB atas dasar harga konstannya.

Tiga pendekatan yang digunakan dalam penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) :

1. Pendekatan produksi:
   $$\text{PDRB} = \sum \text{Nilai Tambah Bruto (NTB) tujuh belas kategori lapangan usaha}$$
2. Pendekatan pendapatan:
   $$\text{PDRB} = \sum \text{Balas jasa faktor produksi dalam suatu wilayah}$$
3. Pendekatan pengeluaran:
   $$\text{PDRB} = \sum \begin{array}{l}\text{Permintaan akhir (konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba,} \\ \text{konsumsi pemerintah, PMTB, perubahan inventori, ekspor dan impor)}\end{array}$$

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung dengan menggunakan metode penghitungan NTB dengan cara:

1. Revaluasi: Perkalian kuantum pada tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar
2. Ekstrapolasi: perkalian nilai produksi pada tahun dasar dengan indeks kuantum atau indeks produksi.

3. Deflasi: membagi nilai produksi pada tahun berjalan dengan indeks harga tahun berjalan.
4. Double deflasi: membagi nilai produksi dan biaya antara pada tahun berjalan dengan indeks harga tahun berjalan.

Ada beberapa manfaat dan penghitungan PDRB antara lain, untuk melihat keterbandingan antar daerah, untuk melihat kesenjangan ekonomi antar daerah dan antar sektor, untuk melihat potensi ekonomi yang masih bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian di masing-masing daerah, PDRB juga digunakan sebagai salah satu komponen dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS, 2018).

2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu atau bisa juga digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah pada suatu periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi ini dihitung berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$2.5 \quad r = \frac{Y_{it} \times 100\%}{Y_{it-1}} - 100\% \qquad (2.1)$$

Di mana:

r = laju pertumbuhan (%)

Y_{it} = PDRB ADHK tahun ke-t (nominal)

Y_{it-1} = PDRB ADHK tahun sebelumnya (nominal)

2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau *open unemployment rate* merupakan indikator ketenagakerjaan untuk melihat persentase proporsi penduduk yang tidak bekerja (*jobless*) dalam angkatan kerja. Angka ini diinterpretasikan sebagai jumlah pengangguran (tidak bekerja atau sedang mencari kerja) dari 100 orang yang termasuk dalam kategori angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100 \qquad (2.2)$$

2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK dihitung dengan membandingkan data angkatan kerja dengan data penduduk usia kerja. Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan proporsi angkatan kerja yang semakin membesar pada struktur demografi suatu wilayah. Dengan melihat TPAK dapat ditunjukkan perbandingan persentase penduduk yang telah dan siap untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian, tingginya TPAK tidak selalu berarti membaiknya kinerja ketenegakerjaan. Apabila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan dalam proporsi penduduk bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Sebaliknya, bila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan penduduk pencari kerja, maka

dikhawatirkan akan memicu tingginya angka pengangguran. Rumus TPAK ditunjukkan oleh Persamaan 2.3 sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja}} \times 100 \qquad (2.3)$$

2.8 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Jika dirumuskan, TKK akan ditunjukkan oleh Persamaan 2.4 sebagai berikut:

$$TKK = \frac{\text{Jumlah penduduk bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$$
$$TKK = 100\% - TPT \qquad (2.4)$$

2.9 Kemiskinan

Di Indonesia, konsep mengenai kemiskinan tersebut diadopsi dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach)*. Besaran nilai kebutuhan dasar minimum tersebut ditentukan dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi makanan dan bukan makanan. Adapun besaran GK yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKNM),

Untuk mendapatkan GK di tingkat provinsi, BPS terlebih dahulu menentukan kelompok acuan sebanyak 20 persen dari penduduk dengan nilai konsumsi yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS adalah GK

pada periode sebelumnya yang telah dikalikan dengan faktor inflasi. Dari kelompok acuan tersebut kemudian dilakukan penghitungan nilai konsumsi terhadap 52 komoditas makanan yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung rata-rata kalori dari ke-52 komoditas tersebut. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh GKM. Selanjutnya, GKM tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah dari penduduk referensi.

Adapun GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub kelompok non makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam SUSENAS Modul Konsumsi. Selanjutnya, penjumlahan dari GKM dan GKNM menghasilkan GK. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Beberapa ukuran kemiskinan adalah sebagai berikut:

a. ***Head Count Index (HCI-P_0)*** adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)
b. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P_1*)** merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

c. **Indeks Keparahan Kemiskinan *(Poverty Severity Index-P_2)*** memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan dan kehidupan layak.

Tabel 2 1 Dimensi, Indikator, dan Indeks Pembangunan Manusia Metode Lama dan Metode Baru

Dimensi	Metode Lama		Metode Baru	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Layak Hidup	PDB Per kapita	Pengeluaran per kapita	PNB per kapita	Pengeluaran per kapita
Agregasi	**Rata-rata Hitung** $IPM = \frac{1}{3}(I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{pendapat}$		**Rata-rata ukur** $IPM = \sqrt[3]{(I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan})}$	

- Angka harapan hidup pada saat lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut kelompok umur.

- Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.
- Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintahan yaitu program wajib belajar
- Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Perhitungan paritas daya beli (PPP) pada metode baru menggunakan 96 komoditas di mana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya komoditas non makanan. Metode penghitungan menggunakan Metode Rao.

IPM suatu wilayah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Keempat kelompok itu adalah :

Tabel 2 2 Klasifikasi Capaian IPM

No	Klasifikasi	Capaian IPM
1	Sangat tinggi	IPM ≥ 80
2	Tinggi	70≤IPM<80
3	Sedang	60≤IPM<70
4	Rendah	IPM<60

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.11 Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya peranan kategori perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan kategori

yang sama pada wilayah yang lebih besar. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kategori ekonomi unggulan yang dapat dikembangkan pada suatu wilayah yang lebih besar. Selain itu, analisis ini juga dipergunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu wilayah.

Rumus LQ yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{x_i^r / x_r}{x_i^n / x_n} \qquad (2.6)$$

Dimana:

x_i^r : Nilai tambah kategori i di Kabupaten Sumenep

x_r : Nilai tambah kategori total di Kabupaten Sumenep

x_i^n : Nilai tambah kategori i di Provinsi Jawa Timur

x_n : Nilai tambah kategori total di Provinsi Jawa Timur

Kriteria yang digunakan dalam metode LQ ini adalah:

LQ > 1, menunjukkan kategori tersebut tergolong kategori unggulan di suatu daerah

LQ < 1, menunjukkan kategori tersebut tergolong kategori non unggulan di suatu daerah

LQ = 1, menunjukkan keswasembadaan kategori tersebut di suatu daerah.

(Ron, 1998).

2.12 Analisis Model Rasio Pertumbuhan

Selain alat analisis LQ, alat analisis lain dirasa penting dipergunakan untuk mengidentifikasi kategori ekonomi potensial suatu daerah (Yusuf, 1999). Analisis

berikut yang digunakan untuk mengidentifikasi kategori ekonomi yang potensial adalah analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Metode identifikasi dari analisis ini berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB.

Tujuan analisis MRP adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB. Rumus yang digunakan dalam perhitungan analisis MRP adalah:

$$RP_{ip} = \frac{\left(y_{ipt} - y_{ip0} / y_{ip0}\right)}{\left(y_{pt} - y_{p0} / y_{p0}\right)} \qquad (2.7)$$

RP_{ip} : Rasio pertumbuhan kategori i Kabupaten Sumenep

y_{ipt}: PDRB kategori i Kabupaten Sumenep tahun 2019

y_{ip0}: PDRB kategori i di Kabupaten Sumenep tahun 2010

y_{pt}: PDRB total Kabupaten Sumenep tahun 2019

y_{p0}: PDRB total Kabupaten Sumenep tahun 2010

$$RP_{in} = \frac{\left(y_{int} - y_{in0} / y_{in0}\right)}{\left(y_{nt} - y_{n0} / y_{n0}\right)} \qquad (2.8)$$

Dimana:

RP_{in} : Rasio pertumbuhan kategori i di Provinsi Jawa Timur

y_{int}: PDRB kategori i di Provinsi Jawa Timur tahun 2019

y_{in0}: PDRB kategori i di Provinsi Jawa Timur tahun 2010

y_{nt}: PDRB total Provinsi Jawa Timur tahun 2019

y_{n0}: PDRB total Provinsi Jawa Timur tahun 2010

Analisis MRP akan menyandingkan RP_{ip} dan RP_{in} suatu kategori lapangan usaha. Penyandingan nilai RP_{ip} dan RP_{in} tersebut ditampilkan dalam kuadran-kuadran.

Adapun interpretasi yang dapat diambil dari hasil analisis MRP adalah sebagai berikut:

- Jika nilai $RP_{ip} > 1$ dan $RP_{in} > 1$ maka pertumbuhan kategori i di wilayah Kabupaten Sumenep dan wilayah Jawa Timur sama-sama tinggi, kategori tersebut merupakan potensi di tingkat regional maupun di Jawa Timur.
- Jika nilai $RP_{ip} >$ dan $RP_{in} < 1$ maka pertumbuhan kategori i di wilayah Kabupaten Sumenep lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur.

Kategori tersebut merupakan potensi di tingkat regional namun tidak berpotensi di Jawa Timur.

- Jika nilai $RP_{ip} <$ dan $RP_{in} > 1$ maka pertumbuhan kategori i di wilayah Kabupaten Sumenep lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur. Kategori tersebut merupakan potensi di tingkat regional tidak berpotensi namun berpotensi di Jawa Timur.
- Jika nilai $RP_{ip} <$ dan $RP_{in} < 1$ maka pertumbuhan kategori i di wilayah Kabupaten Sumenep dan Provinsi Jawa Timur sama-sama rendah. Kategori tersebut sama-sama tidak berpotensi di Kabupaten Sumenep maupun di wilayah Provinsi Jawa Timur.

2.13 Shift Share

Shift Share merupakan salah satu teknik kuantitatif untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas sebagai referensi. Dalam analisis *shift share* terdapat tiga macam rasio pertumbuhan, yaitu:

- *Regional Share* (RS) merupakan komponen share pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor eksternal. RS dapat mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah akibat kondisi perekonomian global yang terjadi.
- *Proportional Shift* Analisis (PS) komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah tersebut yang baik, dengan berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat.

  Differential Shift (DS) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang kompetitif.
- Unsur pertumbuhan ini merupakan keunggulan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan eksport daerah
- *Shift Share* (SS) merupakan penjumlahan dari *Regional Share* dengan *Proportional Share* dan *Differential Share.*

  Rumus yang digunakan adalah

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Di mana:

N_{ij} *(Regional share)* = $E_{ij} * r_n$

Dimana:

E_{ij}: PDRB Kabupaten Sumenep kategori i tahun 2010

r_n: Pertumbuhan total PDRB wilayah Jawa Timur 2019 terhadap PDRB kategori i tahun 2010

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

Dimana:

r_{in} : Pertumbuhan PDRB wilayah Jawa Timur kategori ke-i tahun 2019 terhadap PDRB Jawa Timur kategori ke-i tahun 2010

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Dimana:

r_{ij} : Pertumbuhan PDRB wilayah Kabupaten Sumenep kategori ke-i tahun 2019 terhadap Kabupaten Sumenep kategori ke-i tahun 2010

Penentuan kategori lapangan usaha yang potensial di suatu daerah menggunakan Analisis *Shift Share* dilakukan dengan cara memperhatikan nilai *Proportional Shift* (M_{ij}) dan nilai *Differential Shift* (C_{ij}) dari setiap kategori lapangan usaha yang ada :

Hasil analisis *Shift Share* dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Jika $M_{ij} > 0$ tumbuh lebih cepat dari sektor yang sama di daerah Jawa Timur (secara umum)
- Jika $C_{ij} > 0$ tumbuh lebih cepat dari sektor lain di Kabupaten Sumenep (daya saing yang tinggi dibanding sektor lain)

- Jika $M_{ij} > 0$ dan $C_{ij} > 0$ artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan sangat pesat
- Jika $M_{ij} < 0$ dan $C_{ij} > 0$ artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan terhambat tapi berkembang
- Jika $M_{ij} > 0$ dan $C_{ij} < 0$ artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan terhambat tapi berpotensi
- Jika $M_{ij} < 0$ dan $C_{ij} < 0$ artinya wilayah/sektor dengan daya saing rendah dan peranan terhadap wilayah juga rendah.

2.14 Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokkan suatu sektor, subsektor, usaha, atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi (daerah acuan atau nasional). Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah. Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral (yang dapat diperluas tidak hanya di tingkat sektor tetapi juga subsektor, usaha, ataupun komoditi) menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut:

- Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (G_i) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan (G)

dan memiliki kontribusi terhadap PDRB (S_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan (S). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan G_i lebih besar dari G dan S_i lebih besar dari S. Sektor dalam kuadran I dapat diartikan pula sebagai sektor yang potensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan.

- Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II). Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (G_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan (G) tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah (S_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan (S). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan G_i lebih kecil dari G dan S_i lebih besar dari S. Sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sektor yang telah jenuh.
- Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (G_i) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan (G), tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (S_i) lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan (S). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan G_i lebih besar dari G dan S_i lebih kecil dari S. Sektor dalam kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang sedang *booming*. Meskipun pangsa pasar daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional.

- Sektor relatif tertinggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (G_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan (G) dan sekaligus memiliki kontribusi tersebut terhadap PDRB (S_i) yang lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan (S).

Pertumbuhan sektoral Kontribusi sektoral	$G_i \geq G$	$G_i < G$
$S_i \geq S$	Sektor unggulan dan tumbuh pesat (Kuadran I)	Sektor unggulan tetapi pertumbuhannya tertekan (Kuadran II)
$S_i < S$	Sektor potensial dan masih dapat dikembangkan (Kuadran IV)	Bukan sektor potensial dan tertinggal (Kuadran III)

Keterangan:

G_i : Pertumbuhan sektor i di wilayah analisis

G : Pertumbuhan sektor i di wilayah referensi

S_i : Kontribusi sektor i di wilayah analisis

S : Kontribusi sektor i di wilayah referensi

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam Penyusunan Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Sumenep adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Badan Pusat Statistik sedangakan data sekunder berasal dari OPD Kabupaten Sumenep seperti Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Satu Pintu, dan OPD – OPD terkait.

3.2 Langkah Penelitian

Langkah – langkah Penyusunan Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

1) Menyusun konsep analisis makro ekonomi dengan mencari sumber dari berbagai literatur
2) Mengumpulkan data – data yang termasuk dalam indikator makro ekonomi;
3) Melakukan pemeriksaan data untuk memilah data yang dapat dianalisis dan yang akan digunakan sebagai data pendukung;
4) Melakukan analisis data dengan bantuan *software* dan menggunakan teknik analisis data yang telah ditentukan;
5) Menyajikan hasil analisis data dalam bentuk laporan dan menentukan kesimpulan serta rekomendasi.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data. Alat analisis yang digunakan dalam teknik analisis tersebut adalah grafik, tabel, analisis *Location Quotient,* dan analisis *Shift Share.*

1) Analisis *Location Quotient* (LQ)

$$LQ = \frac{nilai\ tambah\ kategori\ i\ di\ Kabupaten / nilai\ tambah\ total\ di\ Kabupaten}{nilai\ tambah\ kategori\ i\ di\ Provinsi / nilai\ tambah\ total\ di\ Provinsi}$$

Analisis *Location Quotient* digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya peranan kategori perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan kategori yang sama pada wilayah yang lebih besar. Rumus analisis ini adalah sebagai berikut :

2) Analisis Shift Share

Shift Share merupakan salah satu teknik kuantitatif untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas sebagai referensi. Rumus *Shift Share* yang

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

digunakan adalah sebagai berikut :

D_{ij} = *Shift Share* wilayah analisis kategori ke – i

N_{ij} = *Regional Share* wilayah analisis kategori ke – i

M_{ij} = *Proportional Shift* wilayah analisis kategori ke – i

C_{ij} = *Differential Shift* wilayah analisis kategori ke – i

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumenep

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan daya ekonomi yang besar begitu juga sebaliknya. Sedangkan PDRB harga konstan, dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumenep 2015 - 2019

Kat.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.479.217,0	11.310.747,7	12.049.690,4	12.761.455,9	12.833.205,2
B	Pertambangan dan Penggalian	6.685.227,7	6.520.679,7	6.291.152,6	6.470.160,0	5.704.326,6
C	Industri Pengolahan	1.337.803,9	1.468.880,7	1.619.837,0	1.810.791,8	2.016.710,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.404,6	7.967,6	8.965,2	9.803,8	10.391,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.118,2	11.953,6	12.691,5	13.356,0	13.693,1
F	Konstruksi	1.711.631,9	1.916.093,6	2.085.836,9	2.257.577,3	2.442.752,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran;	2.821.677,2	3.177.507,4	3.478.024,7	3.887.105,1	4.246.067,3

Kat.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	260.389,2	293.791,3	327.136,6	358.075,1	396.024,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	158.875,0	182.193,2	205.967,4	229.809,3	252.990,6
J	Informasi dan Komunikasi	1.171.650,7	1.319.527,8	1.458.460,9	1.589.040,5	1.745.399,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	486.627,4	548.297,8	599.577,9	652.171,0	693.298,7
L	Real Estate	238.824,5	260.067,0	280.491,8	306.919,6	330.811,6
M,N	Jasa Perusahaan	49.110,7	53.808,4	58.857,4	65.172,1	70.912,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	822.490,9	893.201,2	969.525,7	1.084.123,0	1.215.217,2
P	Jasa Pendidikan	655.207,3	721.627,8	792.425,5	870.561,1	959.813,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	88.417,3	97.667,6	108.383,4	117.172,2	128.803,1
R,S,T,U	Jasa lainnya	170.241,1	184.997,0	199.213,1	220.254,4	238.219,3
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	27.155.914,5	28.969.009,4	30.546.237,9	32.703.554,2	33.298.636,5
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	21.115.406,4	23.127.447,0	24.975.559,7	27.016.875,7	28.419.710,0

Sumber: Publikasi BPS—PDRB Kabupaten Sumenep Menurut Lapangan Usaha 2015 – 2019

Nilai PDRB Kabupaten Sumenep Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2019 mencapai 33.298.636,5 juta rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 71.749,3 juta atau sekitar 0,6 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2019 sebesar 7.758.094,9 juta rupiah yang juga mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019, Kabupaten Sumenep mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 0,14 persen, melambat dibanding tahun 2017 yang mencapai 3,63 persen.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Dalam suatu publikasi BPS PDRB Kabupaten Sumenep Menurut Lapangan Usaha, disebutkan bahwa struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

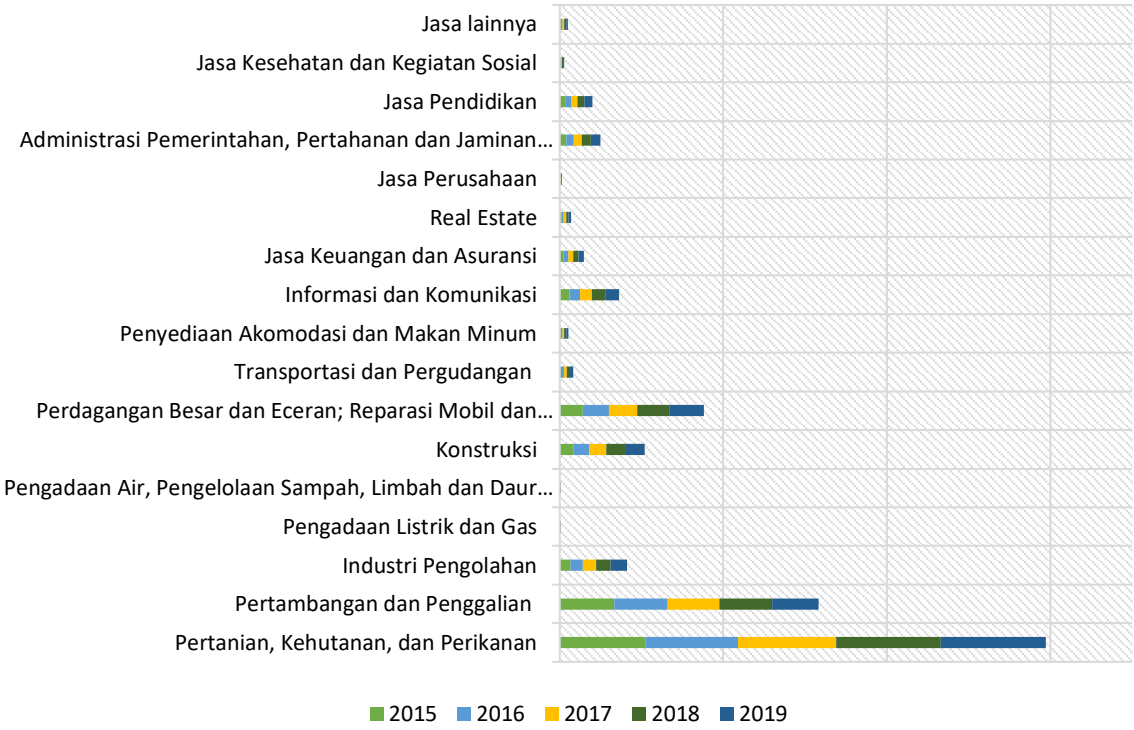

Gambar 4.1 Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Sumenep
Sumber: Publikasi BPS—PDRB Kabupaten Sumenep Menurut Lapangan Usaha 2015 – 2019

Selama lima tahun terakhir (2015 – 2019) struktur ekonomi Kabupaten Sumenep didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sumenep.

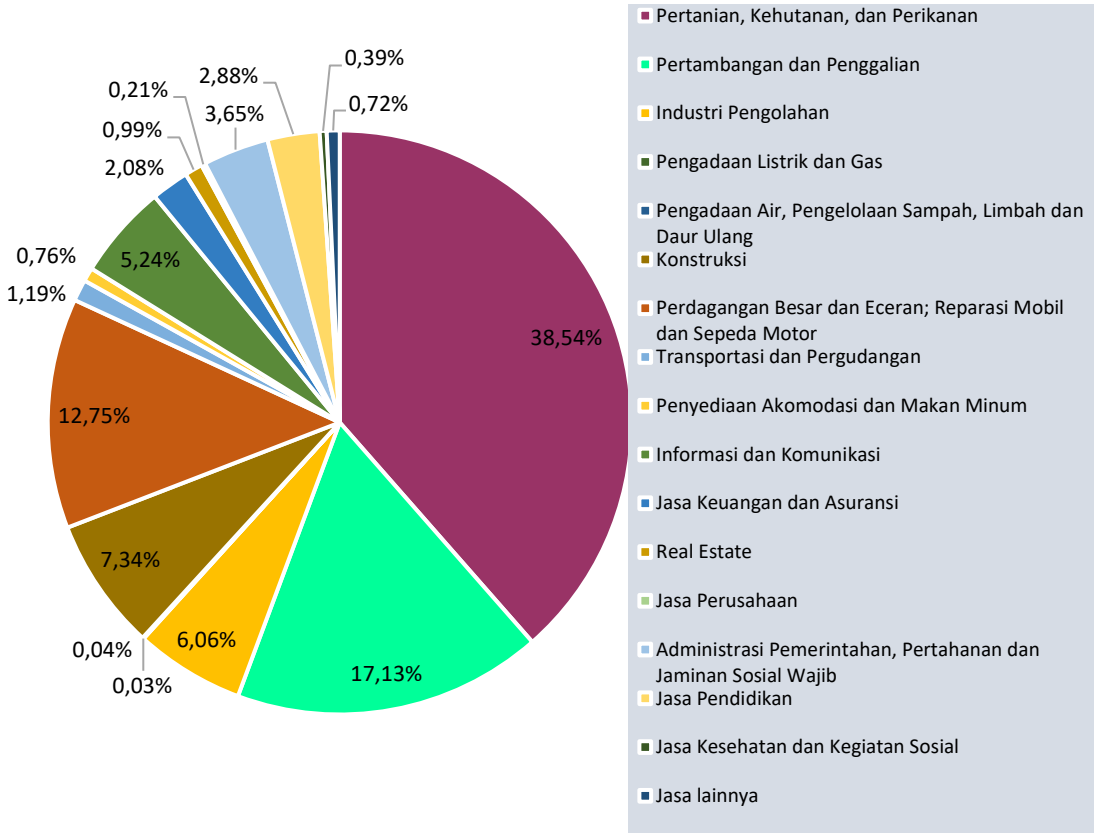

Gambar 4.2 Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Sumenep
Sumber: Publikasi BPS—PDRB Kabupaten Sumenep Menurut Lapangan Usaha 2015 – 2019

Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 68,42 persen pada tahun 2019. Kategori konstruksi sebesar 7,34 persen; dan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 6,06 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya di bawah 6,00 persen.

Pada tahun 2019, Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 7,34 persen terhadap PDRB Sumenep, sedikit meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar 6,90.

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi pada tahun 2015 sebesar 10,39 persen kemudian meningkat menjadi 10,97 persen pada tahun 2016. Sebaliknya, kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

sedikit meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 11,39 persen; dan terus meningkat pada tahun 2018-2019 menjadi 11,89 persen dan 12,75 persen. Fluktuasi yang terjadi pada kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sejalan dengan produksi barang domestik dan impor.

Sumenep merupakan salah satu daerah penghasil komoditas pertanian terbesar di Madura, terutama untuk komoditas tanaman pangan. Kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung meningkat seiring dengan menurunnya kontribusi Pertambangan dan Penggalian khususnya pertambangan migas. Penggalian khususnya pertambangan migas. Selama 2015 – 2019 kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 38,59 persen; 39,04 persen; 39,45 persen; 39,02 persen; dan 38,54 persen.

4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep

Pertumbuhan ekonomi salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep selama periode tahun 2015 – 2019 disajikan pada Gambar 4.3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2019 sebesar 0,14 persen. Nilai tersebut melambat dibanding tahun 2018 yang mencapai 3,58 persen.

Berdasarkan publikasi BPS yang berjudul PDRB Sumenep Menurut Lapangan Usaha 2015 – 2019, banyak faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumenep, baik faktor internal maupun eksternal.

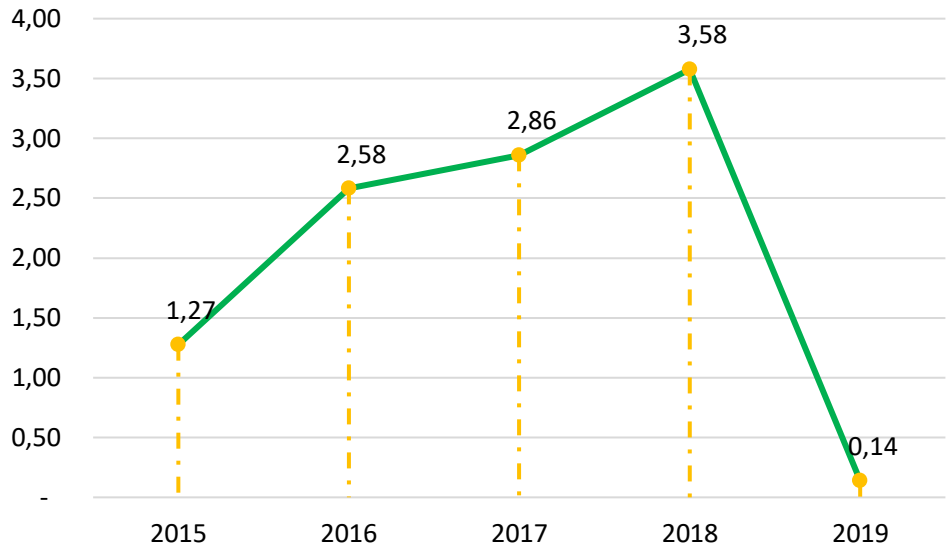

Gambar 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep
Sumber: Publikasi BPS—PDRB Kabupaten Sumenep Menurut Lapangan Usaha 2015 – 2019

Dari sisi eksternal di antaranya kondisi ekonomi global yang belum membaik serta harga komoditas internasional yang masih stagnan di level yang rendah. Beberapa indikator yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep di antaranya keberhasilan pemerintah mempertahankan laju inflasi pada level yang rendah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, juga dipengaruhi oleh penurunan produksi dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Pertambangan dan Penggalian.

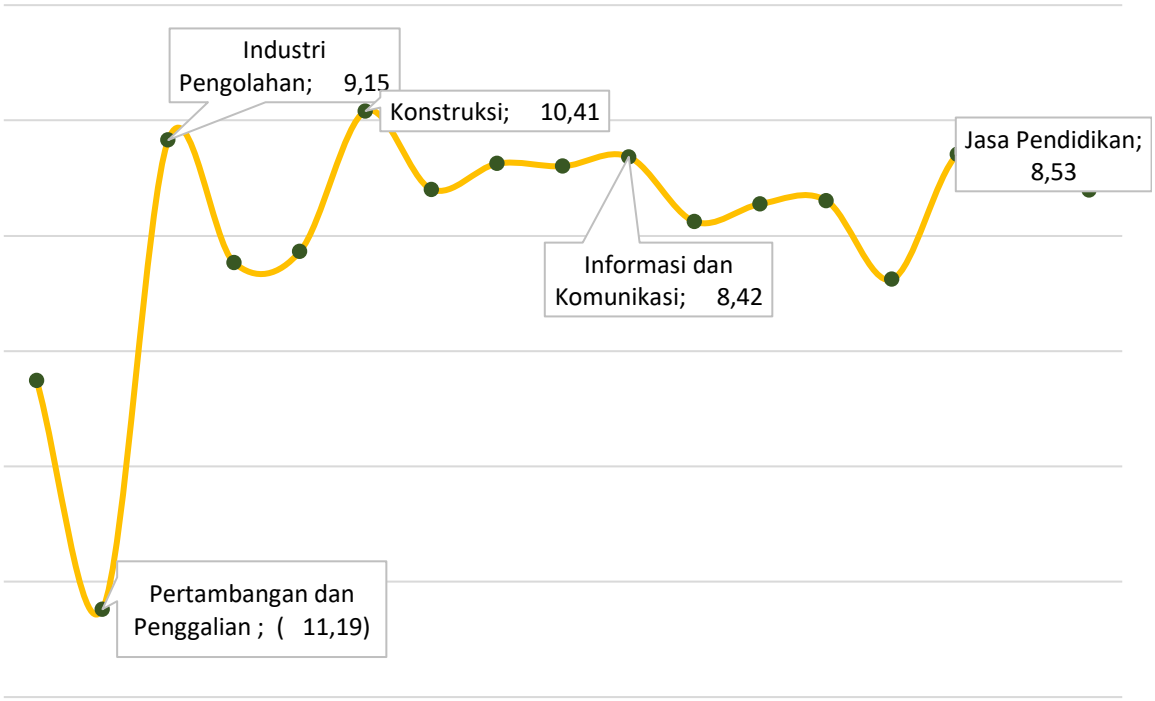

Gambar 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep Menurut Lapangan Usaha
Sumber: Publikasi BPS—PDRB Kabupaten Sumenep Menurut Lapangan Usaha 2015 – 2019

Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 10,41 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 9,15 persen, Jasa Pendidikan sebesar 8,53 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 8,42 persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai pemberi kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Sumenep, tumbuh -1,28 persen pada tahun 2019, menurun dibanding tahun 2018 yang sebesar 2,30 persen.

Hal yang sama terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh melambat 8,17 persen pada tahun 2018 menjadi 7,01 persen pada tahun 2019 serta lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 9,08 persen pada tahun 2018 menjadi 8,01 persen pada tahun 2019. Beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun 2018 yaitu lapangan usaha

Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,13 persen dan Jasa Kesehatan sebesar 7,95 persen serta Konstruksi yang tumbuh sebesar 10,41 persen atau meningkat 3,02 persen poin.

4.3 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten Sumenep

PDRB nominal tahun berjalan apabila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun maka didapat PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk membandingkan satu tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lain secara makro. Tetapi masih perlu diingat bahwa tidak semua faktor produksi yang dapat menimbulkan nilai tambah bagi daerah yang dimiliki oleh penduduk setempat, dan juga masih ada penduduk setempat yang mempunyai faktor produksi di daerah lain. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran.

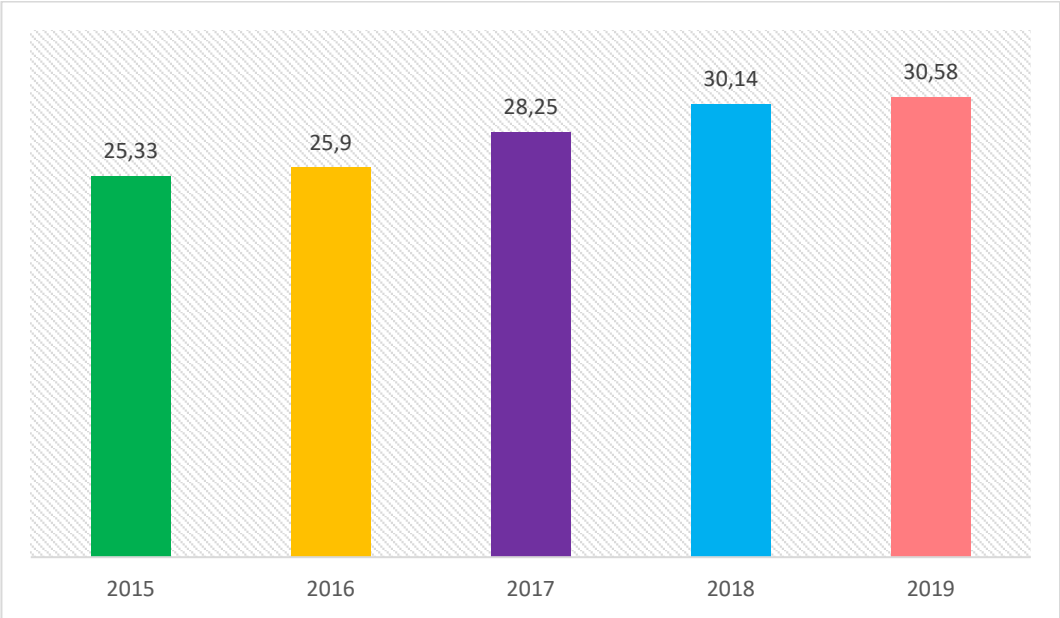

Gambar 4.5 PDRB Per Kapita Kabupaten Sumenep
Sumber: Publikasi BPS—PDRB Kabupaten Sumenep Menurut Lapangan Usaha 2015 – 2019

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Kabupaten Sumenep selalu mengalami fluktuatif. PDRB per kapita Kabupaten Sumenep tahun 2015 sebesar Rp 25,33 juta. Nilai tersebut naik pada tahun 2016 menjadi Rp 26,9 juta dan terus meningkat hingga pada tahun mencapai Rp 30,58 juta. Gambaran tersebut belum dapat dijadikan sebagai ukuran peningkatan kemakmuran masyarakat Kabupaten Sumenep maupun penyebaran pendapatan di setiap strata ekonomi. Hal tersebut dikarenakan inflasi sangat dominan dalam pembentukan PDRB. Namun bisa digunakan sebagai indikasi awal bahwa terjadi peningkatan pada pendapatan masyarakat.

4.4 Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas.

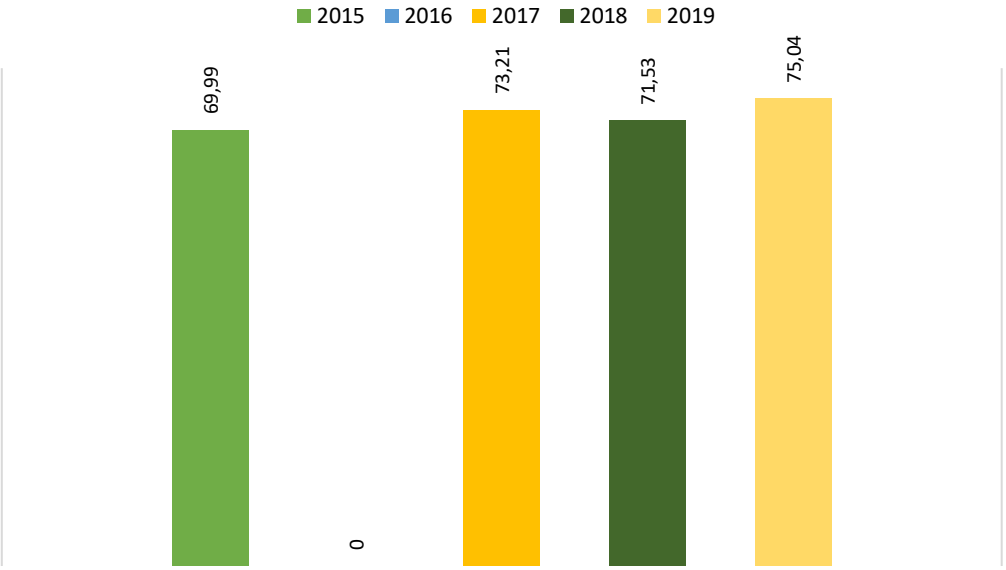

Gambar 4.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sumenep
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep—Data Ketenagakerjaan 2015 – 2019

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2018, tercatat TPAK Kabupaten Sumenep sebesar 71,53 persen. Sedangkan pada tahun 2019 nilai tersebut meningkat menjadi 75,04 persen. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 75,04 penduduk Sumenep yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk aktif di pasar kerja, sedangkan sisanya 24,96 persen memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia.

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

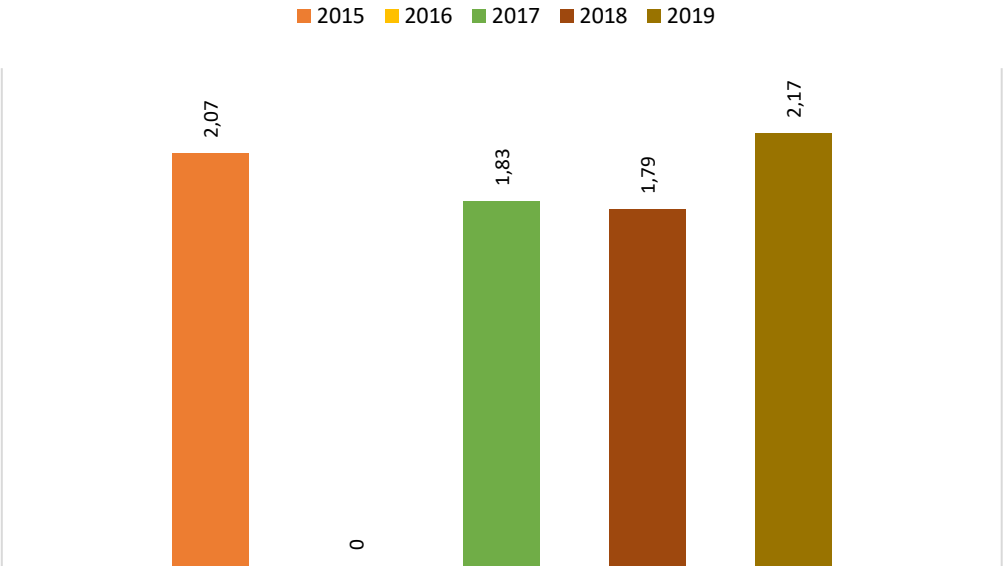

Gambar 4.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumenep
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep—Data Ketenagakerjaan 2015 – 2019

Semakin rendah angka TPT berarti daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Angka TPT Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 sebesar 2,17 persen yang berarti setiap 100 orang angkatan kerja, sebanyak 2-3 orang di antaranya yang termasuk pengangguran. Dengan demikian Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Sumenep sekitar 97,83 persen.

4.5 Kemiskinan Kabupaten Sumenep

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang bersifat mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, strategis, dan komprehensif. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran dengan metodologi yang valid dan dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah.

Metode penghitungan jumlah penduduk miskin yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik dilakukan dengan pendekatan *benchmark* garis kemiskinan.

Garis kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan dasar makanan maupun non makanan. Seseorang dikatakan miskin apabila berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan garis kemiskinan makanan digunakan standar kebutuhan hidup minimum 2.100 kilokalori didasarkan pada konsumsi makanan, sedangkan GK non makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian serta aneka barang dan jasa.

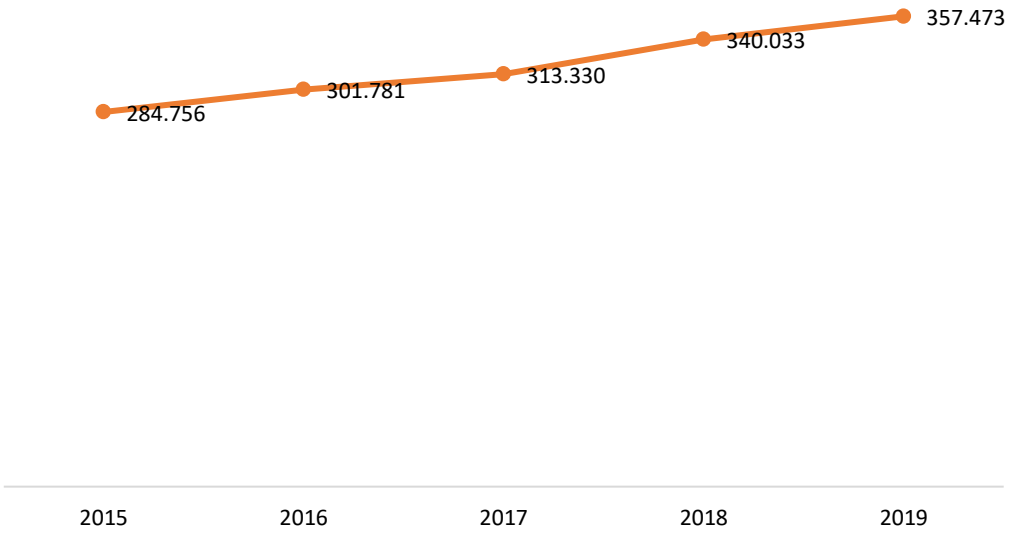

Gambar 4.8 Garis Kemiskinan Kabupaten Sumenep
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep—Data Kemiskinan 2015 – 2019

Gambar 4.8 menunjukkan perkembangan garis kemiskinan untuk wilayah Kabupaten Sumenep 2015-2019. Garis kemiskinan pada tahun 2015 tercatat sebesar 284.756 rupiah per kapita per bulan. Angka tersebut menunjukkan bahwa seseorang di Kabupaten Sumenep akan dikategorikan sebagai penduduk miskin

jika total pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan setiap bulannya kurang dari 284.756 rupiah per kapita per bulan. Garis kemiskinan pada tahun pada tahun 2016 mencapai 301.781 rupiah per kapita per bulan dan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya hingga mencapai 357.473 rupiah pada tahun 2019.

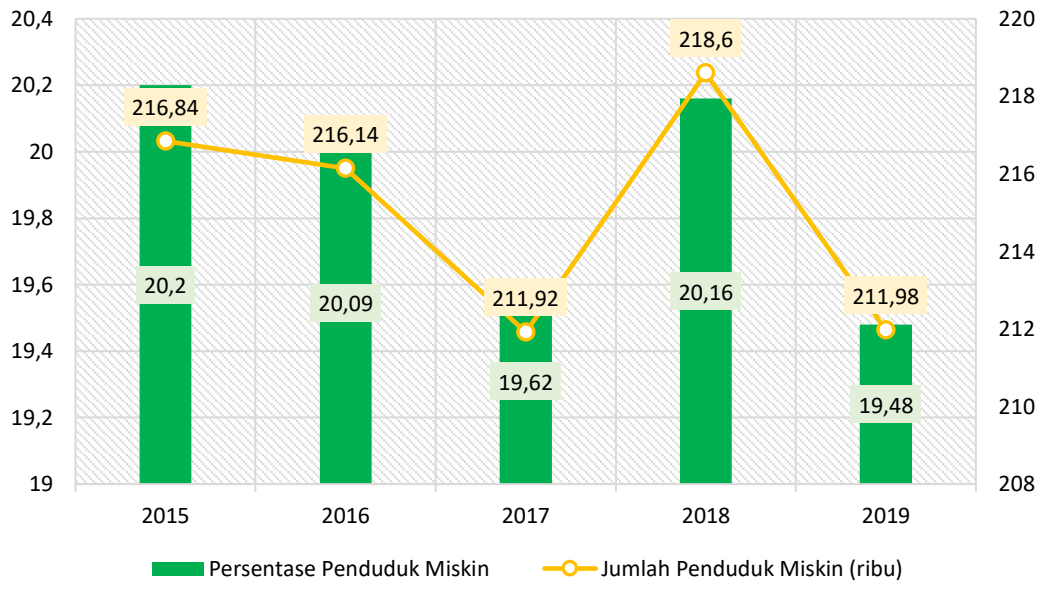

Gambar 4.9 Penduduk Miskin Kabupaten Sumenep
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep—Data Kemiskinan 2015 – 2019

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 216.840 jiwa. Angka tersebut menurun drastis pada tahun 2017 menjadi 211.920 jiwa dan kembali melonjak mencapai 218.600 jiwa pada tahun 2018. Dalam periode 2015-2019, jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin paling tinggi terjadi pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Sumenep berhasil menurunkan persentase penduduk miskin hingga 19,48 persen.

Selaras dengan fluktuasi jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Sumenep selama periode 2015-2019, dapat dilihat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan pada tahun 2017.

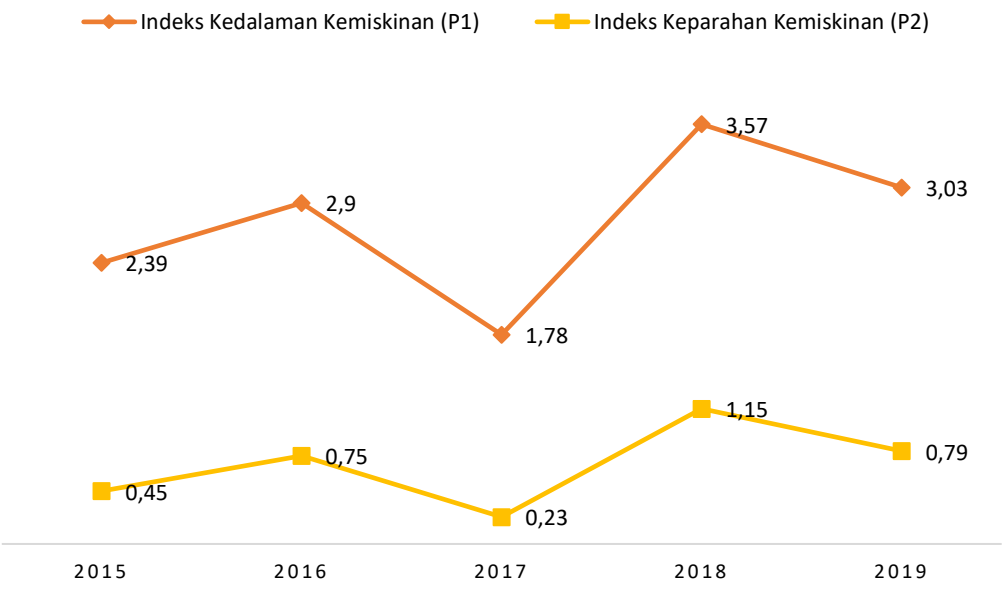

Gambar 4.10 P1 dan P2 Kabupaten Sumenep
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep—Data Kemiskinan 2015 – 2019

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Sumenep dapat dikatakan membaik pada tahun 2017 dan sempat melonjak tinggi pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 telah membaik kembali. Kondisi ini harus terus diperbaiki mengingat angka kemiskinan pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Madura, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumenep merupakan yang paling rendah atau kondisinya lebih baik dibandingkan daerah-daerah tersebut.

4.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah dalam upaya membangun kualitas

hidup masyarakat. IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Berikut capaian IPM Kabupaten Sumenep periode 2015-2019.

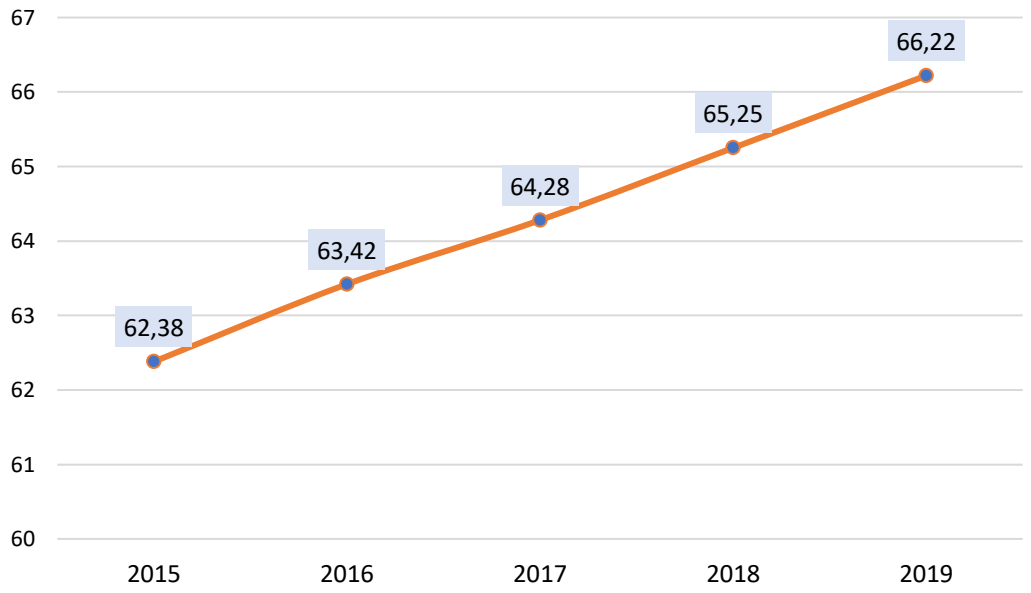

Gambar 4.11 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep—IPM 2015 – 2019

Pembangunan manusia di Kabupaten Sumenep terus mengalami perbaikan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2019. Apabila melihat pada data perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumenep pada tahun 2015 sebesar 62,38 yang termasuk dalam kategori sedang. Hingga pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep mencapai 66,22 yang masih dalam kategori sedang. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Kabupaten yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang juga semakin baik.

Indeks Pembangunan Manusia dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur sejauh mana keberhasilan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di

suatu daerah. Untuk melihat nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumenep tercapai atau belum, dilihat dari target RPJMD yang telah ditetapkan dan capaian yang telah didapatkan sebagai berikut:

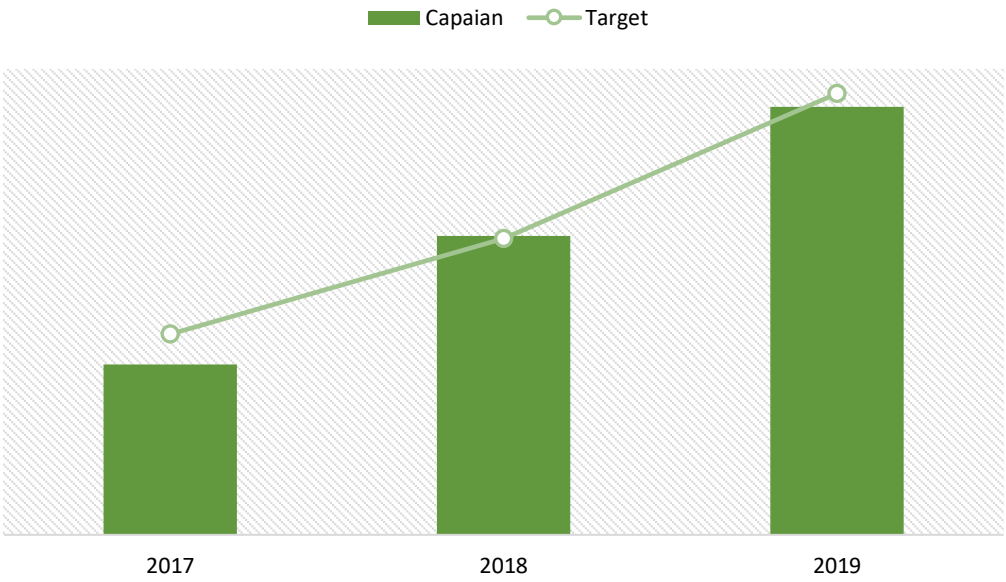

Gambar 4.12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep—IPM 2017 – 2019 dan RPJMD Kabupaten Sumenep

Pada tahun 2017, nilai IPM Kabupaten Sumenep sebesar 62,38 dan angka tersebut terus meningkat hingga 66,32 pada tahun 2019. Namun capaian IPM Kabupaten Sumenep dari tahun 2017 hingga tahun 2019 masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang direpresentasikan dengan kenaikan IPM, maka dibutuhkan program yang menyasar pada tiga bidang pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

4.7 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Penghitungan dengan teknik LQ adalah membandingkan persentase kontribusi tiap kategori dalam PDRB Kabupaten Sumenep dengan persentase kontribusi kategori yang sama dalam PDRB Provinsi Jawa Timur.

Kriteria hasil perhitungan teknik LQ adalah:

1. Bila LQ > 1 menunjukkan kategori tersebut tergolong kategori basis di suatu daerah dan memiliki potensi untuk dikembangkan, karena dianggap memiliki kelebihan dan keuntungan di daerah yang bersangkutan.
2. Bila LQ < 1 menunjukkan kategori tersebut tergolong kategori non basis di suatu daerah dan menandakan kategori tersebut tidak berpotensi untuk dikembangkan, karena kategori tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan ada kecenderungan mengimpor dari daerah lain.
3. Bila LQ = 1 menunjukkan keswasembadaan (*self-sufficiency*) kategori tersebut di suatu daerah

Adapun hasil olah analisis LQ dengan wilayah referensi Jawa Timur disajikan dalam Gambar 4.13 berikut:

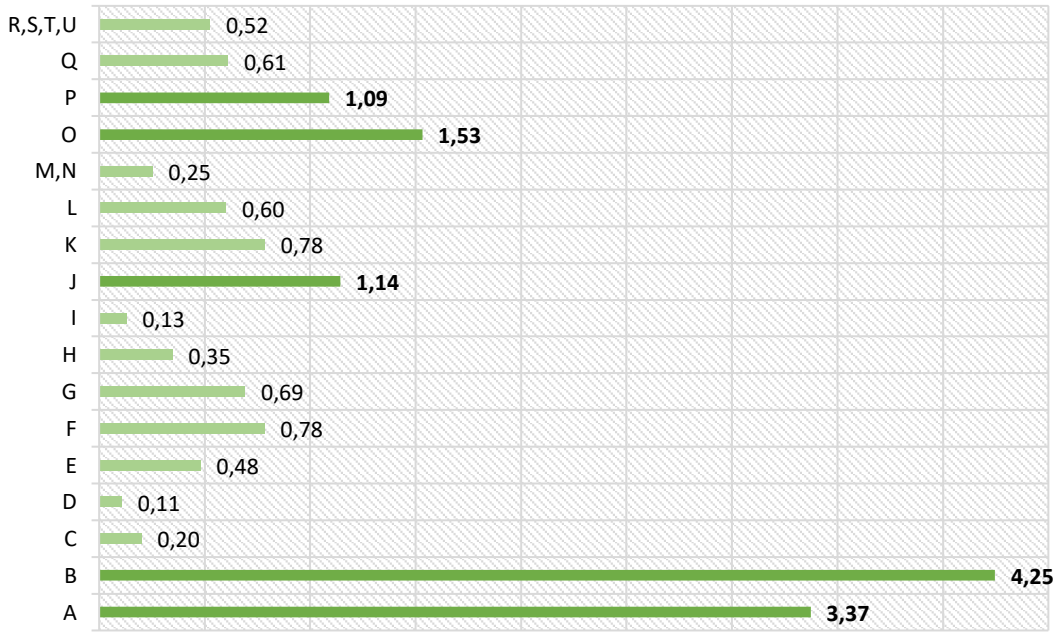

Gambar 4.13 Hasil Perhitungan Analisis LQ dengan Wilayah Referensi Provinsi Jawa Timur
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep dan Provinsi Jawa Timur—PDRB diolah

Hasil analisis LQ yang dilakukan menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep memiliki 5 kategori yang termasuk dalam memiliki keunggulan komparatif di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kategori tersebut antara lain: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A); Pertambangan dan Penggalian (B); Informasi dan Komunikasi (J); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (O); Jasa Pendidikan (P).

4.8 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Tujuan analisis MRP adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (*competitive advantage).* Adapun hasil olah analisis MRP dengan wilayah Provinsi Jawa Timur disajikan dalam gambar sebagai berikut:

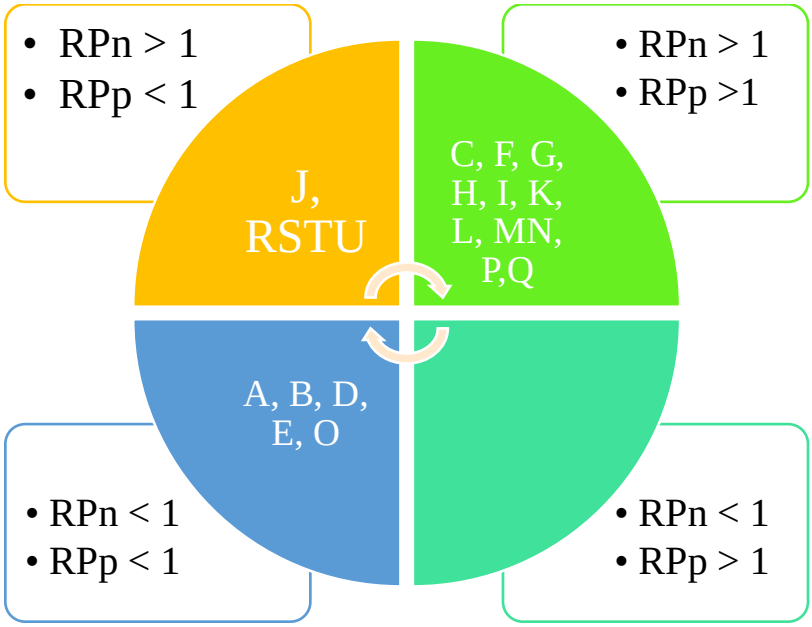

Gambar 4.14 Hasil Perhitungan Analisis MRP Wilayah Referensi Provinsi Jawa Timur
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep dan Provinsi Jawa Timur—PDRB diolah

Hasil analisis MRP yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 10 kategori lapangan usaha yang memiliki nilai RPp > 1 dan RPp > 1. Dengan kata lain, terdapat 10 kategori lapangan usaha yang memiliki keunggulan dari sisi

pertumbuhan ekonominya, baik di level Kabupaten Sumenep maupun level wilayah Jawa Timur. Kategori tersebut antara lain adalah Industri Pengolahan (C), Konstruksi (F), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G), Transportasi dan Pergudangan (H), Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman (I), Jasa Keuangan dan Asuransi (K), Real Estate (L), Jasa Perusahaan (M,N), Jasa Pendidikan (P), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q).

Tidak terdapat kategori lapangan usaha yang memiliki potensi komparatif ide tingkat Kabupaten Sumenep tetapi tidak berpotensi di Provinsi Jawa Timur. Untuk kategori lapangan usaha yang memiliki keunggulan komparatif di tingkat Provinsi Jawa Timur namun lemah di Kabupaten Sumenep adalah Informasi dan Komunikasi (J), dan Jasa Lainnya (R,S,T,U).

4.9 Analisis *Shift Share* (SS)

Hasil analisis *shift share* dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Jika $M_{ij} > 0$ maka kategori tersebut tumbuh lebih cepat dari sektor yang sama di wilayah lain (Provinsi Jawa Timur) secara umum
- Jika $C_{ij} > 0$ maka kategori tersebut tumbuh lebih cepat dari sektor yang lain di daerah analisis (Kabupaten Sumenep) atau dapat dikatakan daya saing kategori tersebut lebih tinggi dibanding kategori lain.
- Jika $M_{ij} > 0$ dan $C_{ij} > 0$ artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan sangat pesat
- Jika $M_{ij} < 0$ dan $C_{ij} > 0$ artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan terhambat namun berkembang

- Jika $M_{ij} > 0$ dan $C_{ij} < 0$ artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan terhambat namun masih berpotensi.

Adapun hasil analisis *shift share* di Kabupaten Sumenep dengan wilayah referensi Provinsi Jawa Timur tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 4.2 Hasil Analisis *Shift Share* Kabupaten Sumenep dengan Wilayah Referensi Provinsi Jawa Timur

Kategori	N_{ij}	Mij		Cij		Dij	Kesimpulan
A	8.055,22	-2.117,92		1.035,99	+	6.973,29	Pertumbuhan terhambat namun berkembang
B	5.101,56	-2.294,37		-814,09		1.993,10	
C	1.063,13	42,88	+	137,31	+	1.243,32	Pertumbuhan sangat pesat
D	7,68	-4,69		1,81	+	4,80	Pertumbuhan terhambat namun berkembang
E	10,92	-3,96		-1,20		5,75	
F	1.341,45	79,33	+	46,11	+	1.466,89	Pertumbuhan sangat pesat
G	2.060,84	165,28	+	520,76	+	2.746,87	Pertumbuhan sangat pesat
H	211,22	93,03	+	-61,88		242,37	pertumbuhan terhambat namun masih berpotensi.
I	127,37	53,84	+	-20,89		160,33	pertumbuhan terhambat namun masih berpotensi.
J	861,57	-67,18		324,25	+	1.118,63	Pertumbuhan terhambat namun berkembang
K	304,65	100,66	+	66,36	+	471,67	Pertumbuhan sangat pesat
L	194,08	1,44	+	-5,90		189,62	pertumbuhan terhambat namun masih berpotensi.
M,N	39,63	5,10	+	-2,65		42,08	pertumbuhan terhambat namun masih berpotensi.
O	768,02	-147,08		35,55	+	656,50	Pertumbuhan terhambat namun berkembang
P	449,77	38,06	+	144,79	+	632,62	Pertumbuhan sangat pesat
Q	61,41	17,11	+	5,61	+	84,13	Pertumbuhan sangat pesat
R,S,T,U	148,59	-34,92		16,45	+	130,12	Pertumbuhan terhambat namun berkembang

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep dan Provinsi Jawa Timur—PDRB diolah

Terlihat dari Tabel 4.2 terdapat 6 kategori lapangan usaha yang memiliki M_{ij} dan C_{ij} atau $M_{ij} > 0$ dan $C_{ij} > 0$. Hasil ini mengindikasikan bahwa tiga kategori tersebut merupakan kategori dengan pertumbuhan sangat pesat. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis *shift share* terdapat 6 kategori yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Sumenep dengan pertumbuhan yang pesat yaitu Industri Pengolahan (C), Konstruksi (F), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G), Jasa Keuangan dan Asuransi (K), Jasa Pendidikan (P), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q).

Terdapat 4 kategori lapangan usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan, namun pertumbuhan terhambat. 4 kategori tersebut adalah Transportasi dan Pergudangan (H), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I), Real Estate (L), dan Jasa Perusahaan (M,N).

4.10 Analisis Tipologi Klassen

Adapun analisis tipologi klassen di Kabupaten Sumenep dengan wilayah referensi Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Tipologi Klassen Kabupaten Sumenep dengan Wilayah Referensi Provinsi Jawa Timur

Kategori	Pertumbuhan PDRB		Ket.	Kontribusi PDRB		Ket
	Kab. Sumenep	Jawa Timur		Kab. Sumenep	Jawa Timur	
A	-1,28	1,10		38,54	11,43	+
B	-11,19	1,47		17,13	4,03	+
C	9,15	6,85	+	6,06	30,24	
D	3,83	1,38	+	0,03	0,29	
E	4,31	4,81		0,04	0,09	
F	10,41	5,89	+	7,34	9,36	
G	7,01	6,01	+	12,75	18,46	
H	8,13	3,77	+	1,19	3,43	
I	8,01	7,58	+	0,76	5,92	
J	8,42	7,36	+	5,24	4,58	+
K	5,61	3,86	+	2,08	2,65	

Kategori	Pertumbuhan PDRB Kab. Sumenep	Pertumbuhan PDRB Jawa Timur	Ket.	Kontribusi PDRB Kab. Sumenep	Kontribusi PDRB Jawa Timur	Ket
L	6,38	6,03	+	0,99	1,65	
M,N	6,53	6,66		0,21	0,84	
O	3,11	3,72		3,65	2,38	+
P	8,53	7,24	+	2,88	2,64	+
Q	7,95	7,55	+	0,39	0,63	
R,S,T,U	6,99	6,26	+	0,72	1,36	

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep dan Provinsi Jawa Timur—PDRB diolah

Hasil analisis Tipologi Klassen yang disajikan pada Tabel 4.3 dapat disusun dalam bentuk matriks yang membentuk 4 kuadran Tipologi Klassen sebagai berikut:

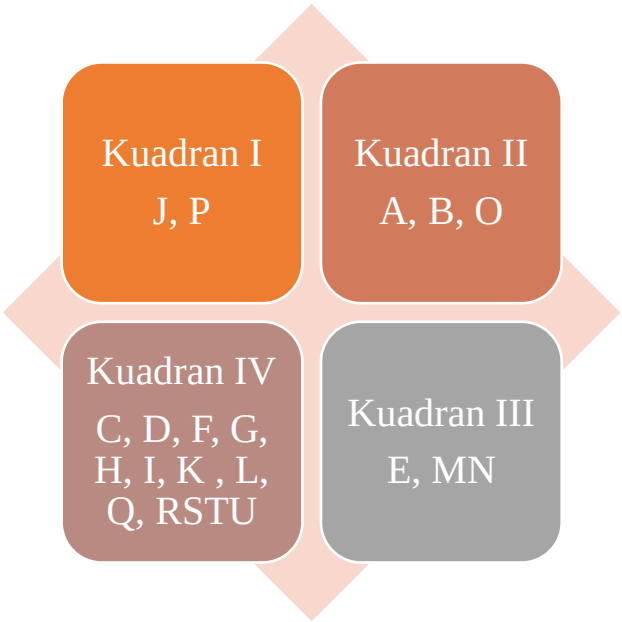

Gambar 4.15 Hasil Perhitungan Tipologi Klassen Wilayah Referensi Provinsi Jawa Timur
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep dan Provinsi Jawa Timur—PDRB diolah

Analisis Tipologi Klassen dilakukan menunjukkan terdapat 2 kategori lapangan usaha berada pada Kuadran I. Kategori tersebut adalah Informasi dan Komunikasi (J) dan Jasa Pendidikan (P). Hal ini dapat diartikan bahwa dua kategori tersebut merupakan lapangan usaha yang maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Sumenep. Kesimpulan ini didukung oleh tidak hanya laju pertumbuhannya yang melebih laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur, tetapi kontribusi 2 kategori

tersebut pada PDRB Kabupaten Sumenep juga lebih besar dibandingkan kontribusi kategori yang sama terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur secara global. Kondisi ini menunjukkan bahwa 2 kategori tersebut merupakan lapangan usaha yang potensial di Provinsi Jawa Timur.

Di samping itu, Kabupaten Sumenep juga memiliki kategori-kategori lain yang berpotensi untuk dikembangkan baik karena memiliki kelebihan dari sisi laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan kategori yang sama di wilayah Jawa Timur (Kuadran II), maupun kategori yang memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi kategori tersebut terhadap perekonomian di wilayah Jawa Timur secara keseluruhan (Kuadran IV). Kategori-kategori tersebut ini antara lain: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A); Pertambangan dan Penggalian (B); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (O); Industri Pengolahan (C); Pengadaan Listrik dan Gas (D); Konstruksi (F), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G); Transportasi dan Pergudangan (H); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I), Jasa Keuangan dan Asuransi (K), Real Estate (L), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q), dan Jasa Lainnya (R, S, T, U).

4.11 Analisis *Overlay*

Analisis *Overlay* pada dasarnya menyandingkan hasil identifikasi potensi-potensi ekonomi dari beberapa alat analisis lainnya. Dalam penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sumenep Tahun 2020 menyandingkan hasil dari Analisis *Location Quotient* (LQ), Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Analisis *Shift Share* (SS), dan Analisis Tipologi Klassen. Penyandingan ini ditujukan agar

pemilihan kategori lapangan usaha yang potensial lebih akurat karena mempertimbangkan beberapa kriteria analisis. Adapun hasil analisis *overlay* tersaji dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Analisis *Overlay* Kabupaten Sumenep dengan Wilayah Referensi Provinsi Jawa Timur

Kategori	LQ	MRP	SS	Klassen	Kesimpulan
A	+				Potensi
B	+				Potensi
C		+	+		Potensi
D					-
E					-
F		+	+		Potensi
G		+	+		Potensi
H		+			-
I		+			-
J	+			+	Unggulan
K		+	+		Potensi
L		+			-
M,N		+			-
O	+				Potensi
P	+	+	+		Unggulan
Q		+	+		Potensi
RSTU					-

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep dan Provinsi Jawa Timur—PDRB diolah

Hasil analisis Overlay menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep memiliki 2 kategori yang bersifat unggulan yaitu Informasi dan Komunikasi (J) dan Jasa Pendidikan (P). Selain itu, terdapat 8 kategori lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A), Pertambangan dan Penggalian (B), Industri Pengolahan (C), Konstruksi (F), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G), Jasa Keuangan dan Asuransi (K), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (O), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q).

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berikut adalah kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sumenep:

1. Perkembangan nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Sumenep tahun 2015-2019 selalu mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan semakin produktifnya perekonomian di Kabupaten Sumenep. Sektor utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 menurun drastis menjadi 0,14 persen. Nilai tersebut melambat dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 3,58 persen.
3. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 8,71 persen. Tujuh kategori lain yang mengalami pertumbuhan positif di atas enam persen antara lain Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Jasa Keuangan dan Ausransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Jasa Lainnya merupakan kategori yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 6 persen.

4. Tren derajat desentralisasi Kabupaten Sumenep selama kurun waktu 2015-2019 masih dalam kategori rendah meskipun terus mengalami perbaikan. Jika dilihat dari ketergantungan keuangan daerah, pada tahun 2019 Kabupaten Sumenep berada dalam kategori Sangat Tinggi dengan rasio ketergantungan daerah sebesar 71,04 persen.
5. Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep perlu menjadi perhatian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat hingga 2,17 persen. Angka tersebut dinilai cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015.
6. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 216.840 jiwa yang kemudian turun hingga 211.980 pada tahun 2019. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Sumenep dapat dikatakan belum cukup baik mengingat persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumenep masih mencapai 19,48 persen.
7. Pembangunan manusia di Kabupaten Sumenep terus mengalami perbaikan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2019. Apabila melihat pada data perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumenep

pada tahun 2015 sebesar 62,38 masuk dalam kategori sedang. Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu melakukan perbaikan pembangunan manusia karena masih belum mencapai target pembangunan di RPJMD.

8. Hasil potensi kategori lapangan usaha yang ditunjukkan oleh beberapa metode analisis menunjukkan bahwa kategori lapangan usaha unggulan di Kabupaten Sumenep adalah Informasi dan Komunikasi dan Jasa Pendidikan.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran informasi tentang kesempatan kerja dapat diumumkan melalui *website* ketenagakerjaan resmi milik pemerintahan yang sudah bermitra dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sumenep untuk kemudahan akses dan sebagai rangka mengikuti perkembangan teknologi.
2. Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu memaksimalkan partisipasi perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, hal ini dilakukan untuk menyelaraskan program prioritas Kabupaten Sumenep dan dapat membantu percepatan pembangunan daerah.
3. IPM di Kota Blitar masih perlu ditingkatkan guna mencapai target yang telah ditetapkan dengan dengan terus memaksimalkan program dari sektor-sektor yang berpengaruh terhadap IPM itu sendiri.

4. Perlu dirumuskan kebijakan yang menunjang berkembangnya infrastruktur untuk meningkatkan daya saing, mengingat kondisi infrastruktur merupakan salah satu faktor besar dalam menguatkan daya saing.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat mulai meningkatkan kualitas UMKM dengan menentukan standarisasi produk dan memberikan fasilitas promosi sehingga sektor pengolahan dapat memberikan kontribusi lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. (2018). *Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul 2018.* Gunungkidul: BPS.

BPS. (2019). *Sumenep Dalam Angka.* Sumenep: BPS.

Ron, H. (1998). *Economic Analysis: A Location Quotient.* Primer: Principal Sun Region Associates, Inc.

Yusuf, M. (1999). Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif Dalam Perencanaan Wilayah dan Kota Aplikasi Model. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vol XLVII No 2*.

KABUPATEN SUMENEP

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sumenep
Jl.KH.Mas Mansyur no 71, Podak, Pabian, Kotasumenep
Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69417